

**Oleh: Sanusi Uwes**

Pemilu Legislatif 9 April 2009 tinggal dalam hitungan hari lagi. Di antara hal yang banyak dikhawatirkan adalah kurangnya partisipasi pemilih menggunakan hak pilihnya. Dalam beberapa monitoring pelaksanaan pemilu kepala daerah, ditemukan alasannya. Alasan utama mereka adalah kejengkelan melihat anggota legislatif melakukan korupsi, selingkuh dalam pembuatan undang-undang, serta berperilaku mewah saat rakyat banyak justru sedang mengalami krisis ekonomi. Mengapa hal itu terjadi, dan siapa yang harus bertanggung jawab akan krisis moral yang melanda legislator tersebut? Secara gampang mungkin parpol jadi tertuduh utama atas krisis moral para legislator tersebut, namun apakah sesederhana itu?

Jika dirunut ke belakang secara geneologi organisasi, dapat diperkirakan, pemimpin bangsa umumnya direkrut dari kalangan aktivis organisasi, khususnya ormas yang punya kaitan kesamaan visi dan misi dengan parpolnya. Bisa jadi ada pengecualian, namun tidak banyak. Dengan demikian, berbagai karakter pemimpin, khususnya yang terkait dengan sikap menghadapi budaya korup, selain cerminan dari pendidikan orang tua mereka di rumah saat anak-anak, kebiasaan bergaul dan bermain dengan peer group-nya saat remaja, juga cerminan kebiasaan cara berpikir dan bertindak mereka dalam ormas atau orpolnya.

Tempo dulu, era 1920-1970, zaman orientasi ideologi primordial masih sangat kuat, kebiasaan berpikir dan bertindak antarorganisasi pemuda dan mahasiswa dapat mudah dideteksi persamaan dan perbedaannya, dan karena itu mudah dilacak latar belakang organisasi seorang aktivis.

Pascaproklamasi reformasi, dapat dikatakan orientasi model tersebut sudah hilang sama sekali. Pascaproklamasi reformasi, umum diketahui bahwa orientasi berpikir para pemimpin bangsa ini sangat pragmatis. Demikian pragmatismenya, sehingga nilai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara yakni Pancasila pun kurang menjadi rujukan, hatta sekadar untuk diperingati hari kelahirannya.

**Pendidikan di rumah**

Pada hakikatnya, anak terlahir membawa potensi baik. Namun, dalam perkembangannya di dunia empiris, mereka mengarah kepada nilai dominan yang memengaruhi lingkungan tempat kehidupan mereka. Anak adalah cerminan dari obsesi orang tuanya, demikian pendirian kaum nativist. Dalam kaitan inilah orang tua harus kuat dan tegas menentukan benar salah, walau

tetap dalam menerapkan dan menyampaikan pada anak melalui senyum penuh kelembutan. Koruptor umumnya lemah memegang kriteria ini. Sedemikian lemahnya pendirian tersebut sehingga mereka berani menentang kebenaran nalar sendiri seperti menguasai uang yang bukan haknya, walau mereka tahu risikonya, yakni tercerabutnya kedudukan, tercorengnya nama baik, serta sinisme sosial sebagai sanksi masyarakat terhadap perilaku korupsi.

Orang tua punya kewajiban agama, kewajiban rasio, dan kewajiban moral untuk memahami bakat dan sifat anak-anaknya. Sejauh mana anak-anak berkarakter positif atau negatif. Karakter positif harus dikembangkan, karakter negatif harus diluruskan. Sesungguhnya setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, yakni berpotensi positif/baik. Penyerapan anak pada baik, benar, umumnya terkait dengan keuntungan, kesenangan, kenikmatan sesaat yang dapat mereka raih. Bila realitas empiris memberikan kesenangan, kenikmatan, keuntungan, maka anak akan menerima hal-hal tersebut sebagai "kebenaran" atau "kebaikan", walau secara normatif atau nalar dewasa, hal itu salah. Pada masyarakat kita banyak orang tua yang tidak paham nilai benar salah terkait perilaku korupsi ini. Umpamanya anggapan kalau jadi pegawai di tempat pengurusan uang atau di tempat sumber kekuasaan, harus kaya. Si subjek menanggung beban sosial jika tidak kaya, malah dianggap bodoh, dan tidak dapat menggunakan kesempatan "baik".

## **Pergaulan**

Pergaulan teman sebaya merupakan daerah pengembangan kepribadian anak yang sangat efektif. Dalam beberapa situasi, kadang kala pengaruhnya jauh lebih besar daripada pendidikan melalui guru di sekolah. Korupsi pikir dan korupsi tindak dalam pergaulan remaja, lambat tapi pasti akan memengaruhi perilaku korup di tempat mereka bekerja. Di masyarakat kita minimal ada dua model pola pergaulan teman sebaya. Pertama model organisasi intrasekolah dan kedua model organisasi ektrasekolah.

Dalam organisasi intra, pembimbingan guru atau "raka senior" jadi rujukan bagi terbimbing. Pewarisan konsep nilai benar-salah, relatif lebih jelas acuan rujukannya. Dalam beberapa hal konsep-konsep tersebut malah diturunkan dari Depdiknas atau Depag, artinya secara formal, sudah mendapat godokan yang matang.

Dalam organisasi ekstra, yang intervalnya sangat panjang, dapat dibagi minimal dua kategori. Pertama, organisasi ekstra yang sangat disiplin dengan norma seperti organisasi remaja milik ormas-ormas keagamaan dan kenegaraan seperti Pramuka. Kedua, organisasi yang sangat cair dengan norma-norma keagamaan dalam bentuk geng-geng remaja yang semata-mata demi kepuasan anggotanya saat itu di suatu tempat tertentu, seperti geng motor, atau preman-preman kecil jalanan. Pada jenis organisasi yang sangat cair dari norma-norma keagamaan tersebut, konsep benar-salah lebih merujuk kepada kepentingan para pimpinannya yang biasanya dipilih dari mereka yang paling kuat otot dan duitnya.

Semua jenis organisasi tersebut, baik yang kental maupun cair dengan norma keagamaan, bagi parpol di Indonesia pada umumnya jadi sumber kantong-kantong perekrutan kepemimpinan formal kenegaraan (legislatif dan eksekutif). Syaratnya sederhana yakni banyak pengikut. Tidak mengherankan, yang bermunculan legislator yang tidak memiliki keterampilan membuat dan

mengkritisi legislasi. Sebaliknya, malah pikiran-pikiran mereka banyak yang menjadi beban legislasi. Dengan demikian, dilihat dari sisi rujukan normatif, sesungguhnya beban terberat pendidikan nilai para pemimpin bangsa ini terletak pada parpol, sebab merekalah yang jadi fasilitator utama aktivis organisasi mengorbit ke panggung perpolitikan nasional.

Dapat dikatakan bahwa mendidik calon pemimpin antikorupsi selain harus dimulai dari rumah dan kelompok bermain remaja, juga harus secara serius dididikkan organisasi pelajar, mahasiswa, pemuda, dan para pemimpin partai politik di Indonesia. Program kegiatan pendidikan antikorupsi harus tegas dan jelas diagendakan. Sasarannya diusulkan bersifat terbuka, artinya tidak terbatas pada internal organisasi, walau segmen ini harus diutamakan, namun juga eksternal, yakni mereka yang bukan anggota organisasi pun diajak serta program pendidikan antikorupsi.

Dalam pembicaraan di masyarakat saat ini sering terdengar sinisme terkait bakat anak-anak yang masih di bawah lima tahun. Diungkapkan bahwa bila anak Anda bersifat kikir, dia berbakat jadi bendahara. Bila dungu, anak tersebut berbakat jadi penunggu mesin pabrik. Namun bila anak itu egois, suka mau menang sendiri, maka dia berbakat jadi politikus atau jadi pemimpin. Tidak sedikit pada kalangan masyarakat uneducated, sinisme tersebut diterima sebagai cara atau bagian menyalurkan bakat anak-anaknya. Pandangan yang benar adalah calon bendahara seharusnya orang yang memasukkan atau mengeluarkan uang instansi sesuai aturan main instansi tersebut. Demikian juga penunggu mesin pabrik, alih-alih orang dungu, sebaliknya harus orang yang halus dan peka daya dengarnya, sehingga sehalus apa pun suara ketidakberesan mesin, dia dapat cepat mendeteksi tingkat kerusakannya. Secara ideal, seorang pemimpin justru bukan orang yang egois, mau menang sendiri, tapi orang yang pada kualitas paling tinggi adalah orang yang berani mengorbankan kepentingan dirinya untuk kepentingan masyarakat banyak. Wallahualam bissawab.\*\*\*

---

*Penulis: Guru Besar UIN Sunan Gunung Djati, Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah.*

*Sumber: Harian Pikiran Rakyat, Rabu 25 Maret 2009*